

Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Saat Pandemi COVID-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)



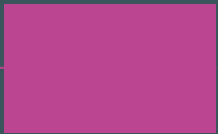
29 Oktober 2021



FORUM
KAJIAN **2021**
PEMBANGUNAN

■ Pemerintah telah berupaya merespons dampak pandemi





Dampak pandemi pada 2021
lebih parah daripada 2020
akibat akumulasi dampak dan
pembatasan mobilitas yang
lebih ketat

Program bansos membantu KPM mengurangi dampak negatif pandemi



Menjadi jaring pengaman



Menambah pendapatan



Memberi jaminan penerimaan uang tunai & sembako



Mengurangi pengeluaran



Mengurangi beban



Memberi ketenangan

Pelaksanaan program bansos selama pandemi memiliki beberapa sisi positif



Banyaknya program telah memperluas sasaran penerima



Mayoritas penerima bantuan tepat sasaran



Kualitas beras bantuan relatif lebih baik dari tahun lalu



Jenis bantuan Program Sembako lebih disesuaikan dengan usulan penerima



Penyediaan media sosial untuk sistem pengaduan



**Pelaksanaan program masih
menghadapi masalah
sehingga manfaatnya tidak
optimal**

Penerima belum sepenuhnya tepat sasaran



1 Ada rumah tangga miskin/rentan/terdampak pandemi yang tidak menerima bantuan

2 Ada rumah tangga tidak miskin/rentan yang menerima bantuan

3 Ada KPM PKH yang tidak mendapatkan Program Sembako

4 Ada tumpang tindih penerima: KPM PKH dan/atau Program Sembako menerima BST

Penyebab ketidaktepatan sasaran

1

DTKS tidak mutakhir dan valid

Masalah administrasi, dokumen, dan data kependudukan

2

3

Kesalahan penentuan sasaran

Masyarakat miskin sudah melakukan beberapa upaya untuk mengakses bantuan



Bertanya kepada pelaksana program dan pemerintah desa/kelurahan



Mendaftar secara mandiri (*online* dan *offline*)



Melapor melalui media sosial atau website pemda, dinsos, kemensos



Mendatangi dukcapil untuk memperbaiki data kependudukan

■ Pemerintah dan pelaksana program juga berupaya membantu akses masyarakat miskin/rentan



Melakukan pmutakhiran data



Melakukan pemadanan data



Koordinator PKH mengusulkan ke koordinator Program Sembako



Membuat dokumen atau memperbaiki data kependudukan



Koordinator Program Sembako mengajukan surat kepada Kemensos

Pemerintah dan pelaksana program telah berupaya mengatasi kasus inklusi dan penerima ganda



Bantuan tidak selalu sesuai ketentuan

KPM PKH tidak menerima bantuan penuh karena ada biaya tambahan

- Biaya admin di e-warong dan BRllink
- Biaya transpor ke bank dan ATM
- Batasan nominal di ATM

KPM Program Sembako tidak bebas memilih jenis, tempat, dan waktu

- Bantuan dalam bentuk paket
- Isi paket ditentukan e-warong dan tidak selalu memenuhi ketentuan variasi
- KPM harus mengambil di e-warong tertentu dan pada waktu tertentu

Nilai bantuan Program Sembako lebih rendah

- E-warong mengenakan biaya plastik, transpor, dll
- KPM tidak tahu pasti nilai bantuan

Praktik bagi rata pada bantuan sembako pemda

- Ada ruta miskin/rentan tidak menerima bantuan
- Penyaluran dikoordinir pengurus RT

Ada bantuan yang terlambat disalurkan

1

Penyaluran PKH dan Program Sembako bertahap setelah pepadanan data penerima dengan NIK

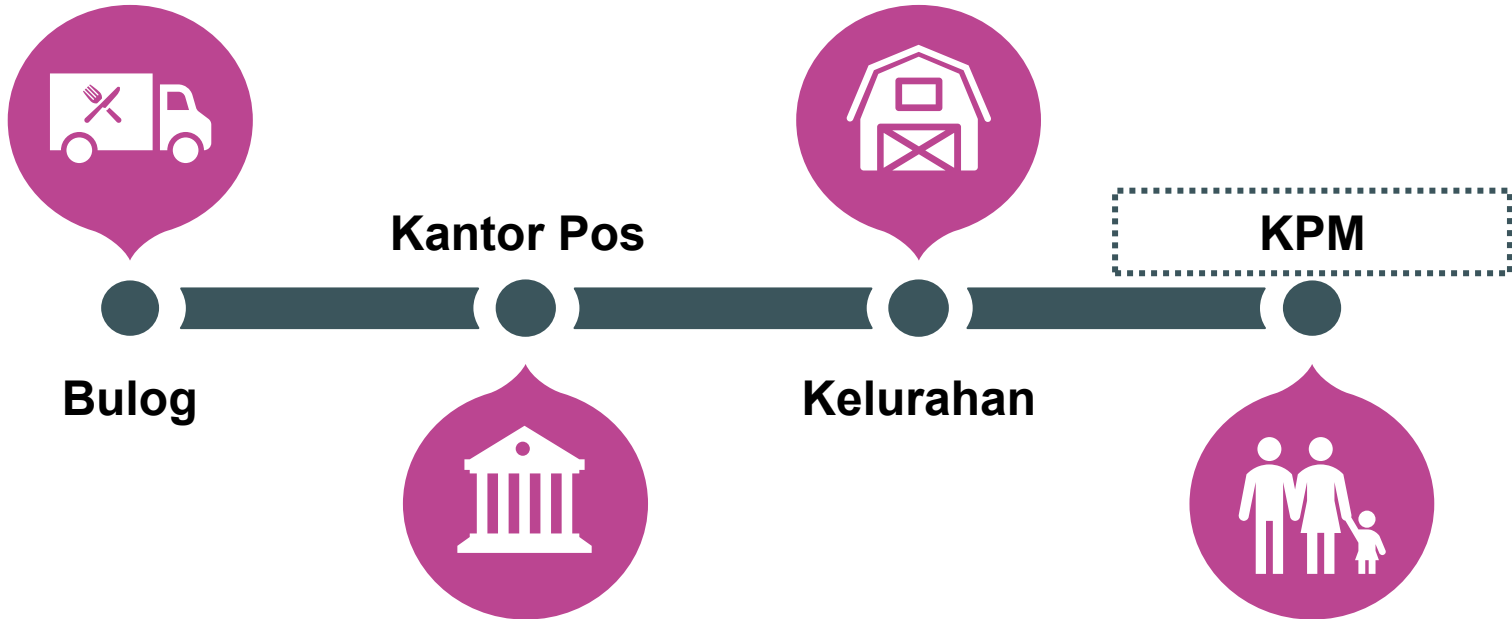
2

Tidak semua e-warong mengetahui penyesuaian penyaluran Program Sembako

3

Penyaluran BST terlambat: bantuan Mei-Juni 2021 disalurkan pada Juli 2021

Ada bantuan yang distribusinya kurang ringkas

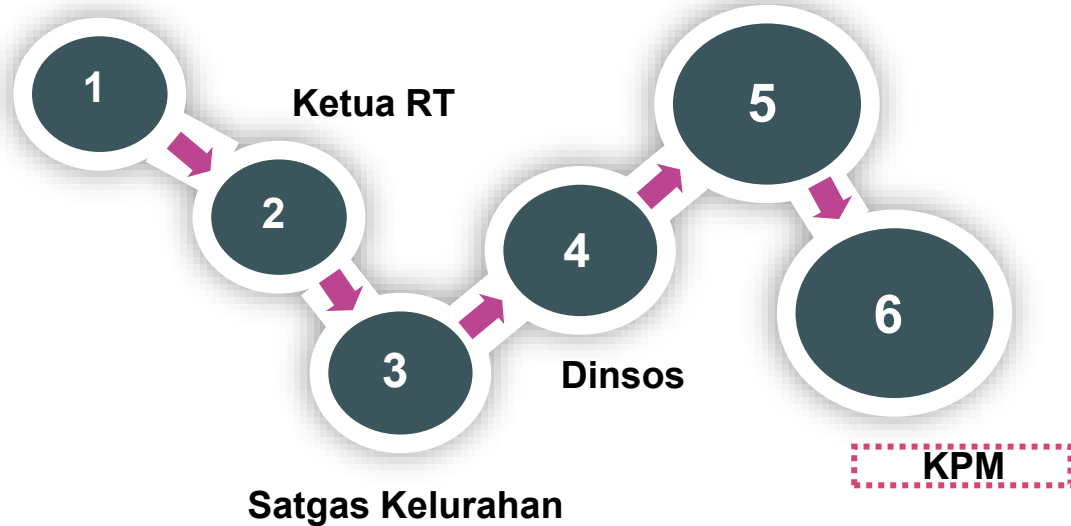


Bantuan Beras PPKM/Bulog/CBP di salah satu daerah studi

Ada bantuan yang alur pengajuannya kurang ringkas

Bukti hasil PCR dan surat keterangan puskesmas

SK walikota/gubernur



Pelaksanaan program bansos juga menghadapi berbagai permasalahan lain

1. Penyaluran bantuan yang berbarengan menyulitkan pelaksana di daerah
2. Saldo kosong menyebabkan KPM tidak bisa menerima bansos
3. Masih ditemukan kasus beras bantuan berkualitas kurang baik
4. Koordinasi pusat dan daerah terbatas
5. Sosialisasi program minim dan tidak menyeluruh
6. Pengawasan pelaksanaan program minim

■ Penyesuaian mekanisme program tidak selalu bermanfaat bagi KPM



Mempersingkat periode pemenuhan kebutuhan



Meningkatkan risiko rusaknya barang bantuan



Menimbulkan 'kewajiban' berbagi



Menyulitkan pengambilan



Pemerintah harus memastikan **ketepatan sasaran**, memaksimalkan manfaat bantuan, dan menjamin RTM menerima bantuan secara utuh serta sesuai ketentuan

1 Memastikan ketepatan sasaran

Melakukan pemutakhiran DTKS secara berkala & berkualitas

Data layak hasil pemutakhiran daerah harus dijamin terakomodasi di dalam DTKS



Membangun koordinasi & komunikasi pemutakhiran data yang efektif antara pusat dan daerah

Membangun sistem yang dapat membatasi kesalahan inklusi & eksklusi

2

Menjamin KPM menerima bantuan secara utuh dan sesuai ketentuan

1

Mengatur biaya administrasi pengambilan bantuan

3

Mempertimbangkan kepentingan KPM dalam mengubah mekanisme bantuan

2

Menyalurkan bantuan sesuai ketentuan

4

Membangun sistem pemantauan bantuan yang efektif

3

Memaksimalkan manfaat bantuan

Menyalurkan tepat waktu sesuai periode bantuan



Menyederhanakan alur distribusi bantuan

Meningkatkan sosialisasi & koordinasi pelaksanaan bansos

Mengingat dampak pandemi masih berlangsung, penyelenggaraan bansos yang ada saat ini masih perlu dilanjutkan.

“

THANK YOU



www.smeru.or.id



smeru@smeru.or.id



[@SMERUInstitute](https://www.facebook.com/SMERUInstitute)



The SMERU Research Institute



[@smeru.institute](https://www.linkedin.com/company/smeru)



[@riseprogramme.id](https://www.instagram.com/riseprogramme)